



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016-2020 DALAM PEMBUATAN PERTURAN DAERAH
MENURUT FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

ADHA ENGGARTIAS
NIM. 11724202926

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2020 DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Adha Enggartias .

NIM : 11724202926

Program Studi: Hukum Tata Negara Islam

Dapat di terima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru ,22 juli 2021

Pembimbing skripsi

HASWIR, M, Ag

NIP:196911191996031002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2020 DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH MENURUT FIQIH SIYASAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **ADHA ENGGARTIAS**
 NIM : 11724202926
 Program Studi : Hukum tata negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 21 September 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 September 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Nuryanti, S.EI. ME.Sy

Penguji I
Dr. Drs. H. Hajar, MAg

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adha Enggartias
NIM : 11724202926
Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 18 April 1997
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum tata negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pekaksanaan fungsi legislasi DPRD kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 - 2020 dalam pembuatan Perdduran daerah
da tinjau dalam fiqh siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Kamis, 16 September 2021

Yang membuat pernyataan

10000
SEPULUH RIBU RUPAH
METERAI
TEMPEL
4BCAJX416197084
Adha Enggartias
NIM : 11724202926

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adha Enggartias(2021) : Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Menurut Fiqih Siyasah

Penelitian ini di latarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat dalam Undang-Undang terbaru ini bahwa fungsi DPRD sebagai fungsi legislasi melainkan untuk membentuk peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, maka dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat adanya persamaan dan perbedaan dalam fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahannya khususnya dalam mekanisme pembuatan peraturan daerah. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Adapun latar belakang penulisan pada skripsi ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Hal Pembuatan Peraturan Daerah Oleh DPRD Di Kabupaten Bengkalis dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian Dalam populasi dan sampel keseluruhan adalah sumber data yang di kumpulkan untuk bahan penelitian. Melalui wawancara dan observasi lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada dan penulis meninjau dengan pandangan fiqih siyasah dengan menampilkan *nash* Al-Qur'an, Hadist dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang di tarik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Fiqih Siyasah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD ini termasuk pada sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan, kemudian persamaannya adalah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan-Fungsi Legislasi-DPRD-Fiqh Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **“Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah”**.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Marjono, ibunda tercinta Mira, kakak Orin rasmara arrum S.Pd, adik saya Septiana Sukma Langgeng yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Drs. H. Promadi, MA, Pd.D selaku Wakil Rektor III, yang telah memimpin, mengelola serta menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti pengikut perkuliahan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Drs. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Haswir, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU bapak Helmi Basri Dr.,H.,Lc.,M.A
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 17 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.
9. Untuk Sahabat, Teman-Teman, Senior HTNS, yang sangat berjasa yang telah banyak membantu penulis baik dalam memotivasi dan memberi semangat.
10. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama-namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal ‘alamin.

Pekanbaru, 09 September 2021

Penulis,

Adha Enggartias

NIM.11724202926

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	8
E. Metode penelitian	9

BAB II TINJUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Bengkalis	14
B. Demografi Kabupaten Bengkalis.....	23
C. DPRD Kabupaten Bengkalis	27
D. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis	32
E. Jumlah Penduduk.....	34
F. Pendidikan	40
G. Keagamaan.....	44
H. Adat istiadat	45

BAB III LANDASAN TEORI TENTANG PELAKSANAAN

FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM ISLAM

A. Pengertian Legislasi	47
B. Fungsi Legislasi DPRD	49
C. Hak dan Kewajiban DPRD	54
D. Tugas dan Wewenang DPRD	55
E. Kajian Fiqih Siyasah	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2020 DALAM PEMBUATAN PERDA MENURUT FIQIH SIYASAH

A. Pelaksanaan Fungsi Legialasi DPRD	69
B. Tinjauan Fiqih Siyasaah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	77

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	86

DAFTAR PSUTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis	28
Table 2.3	Komposisi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam dua periode terakhir	29
Table 2.4	Nama nama anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menurut partai politiknya.....	30
Table 2.5	Jumlah produk hukum kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018...	32
Table 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Sex Rasio di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	35
Tabel 2.7	Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis.....	36
Table 2.8	Jumlah Sekolah, murid dan guru SD di Kabupaten Bengkalis tahun 2016.....	41
Table 2.9	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru MI di Kabupaten Bengkalis tahun 2016.....	42
Table.2.10	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru MTS di Kabupaten Bengkalis tahun 2016.....	43
Table.2.11	Jumlah sekolah ,murid dan guru SMP di kabupaten bengkalis tahun 2016.....	44
Table.2.12	Jumlah sekolah ,murid dan guru SMA di kabupaten bengkalis tahun 2016.....	45
Table.2.13	Jumlah sekolah ,murid dan guru MA di kabupaten bengkalis tahun 2016.....	46
Table. 2.14	Jumlah sekolah ,siswa ,guru SMK di kabupaten bengkalis 2016.	47
Table . 2.15	Jumlah kampus ,mahasiswa dan dosen di kabupaten bengkalis tahun 2016.....	48
Table. 2.16	Jumlah sarana ibadah di kabupaten bengkalis mulai dari tahun 2014-2019.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara kesatuan. Hal ini menunjukkan secara otomatis bahwa Indonesia adalah Negara yang kekuasaannya di pecar kedaerah- daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi. Daerah mendapatkan hak yang dating dari, atau diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan konstitusi.¹

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 maka kebijaksanaan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Pemerintah Daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk

¹. Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta:Rajawali pers,2012), cet.ke1, h.215.

².Petrus Agapa,“Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Membuat Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2009 ± 2014”, Jurnal Renaissance | Volume 2 No. 02 | Agustus 2017, h. 246.

kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.³

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat dalam Undang-Undang terbaru ini bahwa fungsi DPRD sebagai fungsi legislasi melainkan untuk membentuk peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, maka dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat adanya persamaan dan perbedaan dalam fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahannya khususnya dalam mekanisme pembuatan peraturan daerah.⁴ Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu

³. Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004), cet. ke-2, h. 18.

⁴. http://digilib.uinsby.ac.id/24429/1/Mirza%20Elmy%20Safira_F02216034.pdf. Diakses pada 29 maret 2021.

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa: pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁵

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat produk hukum yang dihasilkan oleh suatu daerah, salah satunya Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

DPRD memegang peranan penting dalam sistem demokrasi dimana perwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah.

Peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian pelaksanaan fungsi DPRD lebih dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.⁶

⁵ . Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) *Tentang Otonomi Daerah*

⁶ . Monica Galuh Sekar Wijayanti, dkk.”*Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan daerah merupakan perwujudan dari fungsi legislasi yakni merupakan fungsi dari parlemen untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur (*regelendde fucntie*), hal ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga Negara dengan norma hukum yang mengikat dan membatasinya. *Instrument* perancangan peraturan daerah dilakukan dalam *porlegda* (program legislasi daerah) yang disusun bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pemerintahan daerah juga merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu. Dengan kata lain peraturan daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan.

Dalam pembuatan dan perencanaan rancangan peraturan daerah sebagai implementasi dari fungsi legislasi, DPRD dilaksanakan dengan cara, membahas bersama bupati/walikota, mengajukan usul rancangan peraturan daerah, menyusun program peraturan daerah bersama bupati/walikota.

Fungsi pokok badan legislasi adalah menentukan *policy* (kebijakan) dan membuat undang-undang, untuk itu DPRD di beri hak legislatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan peraturan perundang –undangan yang disusun oleh pemerintah.

Dalam konteks kedaerahan, fungsi legislasi berarti fungsi pembuatan peraturan daerah (PERDA). Fungsi legislasi yang melekat di DPR/DPRD bahkan dikatakan sebagai fungsi utama dan asli sebagai badan legislatif. Melalui fungsi legislatif itulah warna dan karakter serta kualitas baik secara material maupun fungsional terlihat. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diberi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau *implementasi* dari fungsi legislasi harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (PERDA). Pelaksanaan hak-hak DPRD tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar dan baik. Pelaksanaan tersebut tergantung dari sikap eksekutif dan peran positif DPRD. Seberapa jauh DPRD dan anggota-anggotanya mempunyai integritas dan ketangguhan dalam melaksanakan haknya demi kebaikan Pemerintah Daerah guna keperluan rakyat yang diwakilinya. DPRD seharusnya menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai Peraturan Daerah yang akan mengikat pada masyarakat, sebab merekalah yang tahu mengenai apa keinginan masyarakat daerah.

Seperti diketahui, *Propemperda* adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui Propemperda ini diharapkan pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistimatis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi itu sendiri tidak hanya pembentukan peraturan daerah yang pro rakyat tetapi termasuk juga fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap operasionalisasi suatu peraturan daerah, apakah pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan fungsinya sebagaimana diharapkan atau tidak. Fungsi pengawasan ini menjadi unsur terpenting di dalam mengembangkan hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah kabupaten/kota dengan DPRD. Program Legislasi daerah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disusun oleh panitia legislasi oleh asistensi mencerminkan adanya rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Daerah (Eksekutif) dan Inisiatif dari DPRD (Legislatif) Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dalam tahun 2016 dan 2020. Pada tahun 2016/2020 atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Bengkalis terdapat 19 Raperda yang diusulkan untuk masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) DPRD Kabupaten Bengkalis. Dari 19 Raperda tersebut yang masuk dalam Prolegda adalah sebanyak 15 Reperda.

Dalam fiqh siyasah kekuasaan membentuk undang-undang dan pembentukan peraturan lainnya disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *ahl al-hlli wa al-aqdi* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam . Dengan demikian unsur –unsur legislasi dalam islam meliputi : pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat islam yang akan melaksanakanya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai – nilai syariat Islam. Jadi kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas siyasah Syar'iyahnya yang dilaksanakan oleh *Ahl al-halli wa al-aqdi* untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam.⁷

Pelaksanaan legislasi di DPRD Bengkalis menerapkan prinsip *Good Governance* menuntut pemerintah daerah dan DPRD dua hal yaitu: 1) kemampuan menjawab (*answerability*) dan, 2) konsekwensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber dana telah dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber dana tersebut.

Ada beberapa perbedaan dan pengkhususan sebenarnya dalam pembagian kekuasaan, telah terdapat dalam pemerintah Islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang *Trias Politica*. Ketiga kekuasaan ini kekuasaan-kekuasaan *tanfizihiyah* (eksekutif), *tasyri'iyah* (legislatif), dan kekuasaan *qadha'iyah* (yudikatif) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat.

Berdasarkan uraian di atas mengingat betapa pentingnya pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD dalam pembuatan peraturan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji secara lebih detail

⁷. Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet.ke-2, h,187-188.



dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul
**“PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN
 BENGKALIS TAHUN 2016/2020 DALAM PEMBUATAN PERATURAN
 DAERAH DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH”**

B. Batasan masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Hanya membahas fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2016/2020 dalam hal pembuatan peraturan daerah.
2. Hanya membahas tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Bengkalis tahun 2016/2020 dalam hal pembentukan peraturan daerah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Hal Pembuatan Peraturan Daerah Oleh DPRD Di Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Di Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Adapun Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Di Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun ,metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka penelitian pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bengkalis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, proses penelitian dimulai dengan berpikir secara induktif, yakni mengungkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian yang terbentuk dari kata-kata, kalimat dan narasi. Jenis pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah kantor DPRD Kabupaten Bengkalis. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara mengenai permasalahan.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Yang menjadi subyek penelitian ini adalah Ketua/Wakil Ketua DPRD Bengkalis.
- b. Yang menjadi Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bengkalis dalam pembentukan peraturan daerah.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD kabupaten Bengkalis, yang terdiri dari 45 orang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti

⁸. Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: kencana 2006).Cet-2, h.50.

menjalajahi objek/ situasi social yang di teliti.⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah wakil ketua DPRD Bengkalis.

5. Sumber dan Jenis data

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di peroleh langsung dari responden,observasi,wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang di teliti.¹⁰

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.¹¹
- b. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹²

⁹ . Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,CV,2018), cet.ke-2, .h.96

¹⁰ .Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Wali Persada, 2003).Cet-2,h.30.

¹¹ .Sugiyono *Memahami penelitian Kualitatif*.(Bandung :Alfabeta,2014),Cet-1,h.64.

¹² . Juliansyah Noor,*Metodologi Penelitian Skripsi ,tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*,(Jakarta Kencana,2011), edisi ke-1, cet ke-1,h.138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data ,misalnya buku-buku, dokumen,jurnal, peraturan dan lainnya.¹³

d. Kajian pustaka

Yaitu dengan memperbanyak sumber-sumber dari buku-buku bacaan untuk menuntaskan masalah yang di teliti oleh peneliti.

7. Analisis data

a. Reduksi Data Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Model Data (Data Display), Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan¹⁴

8. Metode Penulisan

a. Deskriptif , yaitu dengan cara menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

¹³ . Hartono *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), cet.ke-2 h. 62.

¹⁴ .<https://media.neliti.com/media/publications/255793-pelaksanaan-fungsi-legislasi-dprd-dalam-2c873caf.pdf>. Diakses pada 29 maret 2021.

- b. Induktif , yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian,dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif ,yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Sejarah penamaan suatu daerah atau suatu tempat merupakan upaya untuk menjelaskan asal-usul nama suatu daerah. Nama suatu daerah berdasarkan sebuah peristiwa, bentukan alam atau sesuatu yang istimewa sehingga menjadi kenangan bagi penduduknya adalah sesuatu yang lumrah, Asal nama Bengkalis tidak dapat diketahui secara pasti.

Ada beberapa versi yang diyakini dan berkembang di tengah masyarakat Bengkalis. Pada tahun 1717, Raja kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, pewaris Kerajaan Melayu Johor datang di sebelah pulau yang letaknya tidak jauh dari Kampung Muntai. Kedatangan Raja Kecil disambut oleh beberapa Bathin dari daerah Senggoro, Bathin Merbau, dan Bathin Selat Tebing Tinggi yang pada waktu itu berkuasa. Raja Kecil terus menunggu serangan dari Johor, dalam pengasingnya di pulau yang belum memiliki nama, semakin lama semakin menjemukan. Dalam penantian yang tidak pasti, Raja Kecil berkata pada pengikutnya “Mengkal” (sebak) rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai sultan yang memerintah negeri. Namun tidak mengapalah kita masih “Kalis” (tabah) karena belum diakui lagi sebagai raja. Disamping itu ada versi lain yang berkembang di tengah masyarakat Bengkalis yang mengatakan bahwa kata Bengkalis kononnya berasal dari nama pohon yang banyak tumbuh dipinggiran sebuah sungai yang bernama sesuai dengan pohon tersebut yakni Pohon Bengkala. Pohon Bengkala (dikenal juga dengan nama Senpi) banyak tumbuh di hutan Pulau Bengkalis. Dan,



berdasarkan versi lain menurut buku cerita rakyat Riau yang diterbitkan Kantor Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata Provinsi Riau disebutkan asal mula nama Bengkalis berasal dari kata pulau mengkali yang diucapkan seorang penduduk di Sungai Bukit Batu ketika melihat berbentuk daratan dari kejauhan. Kata pulau mengkalisini bermeterfosa menjadi Pulau Bengkalis sampai saat ini. Mengkali sendiri dalam bahasa Melayu lama berarti kalau tidak salah atau barangkali.¹⁵

Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan Kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buntan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejahleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan

¹⁵. M.RezekiMauliddin, Drs.RidwanMelay, M.Hum, Bunari, S.Pd. M.Si *The History Of The Establishment Of Bengkalis Regency, Riau Province In 1958(A Historical Review)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung. Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara Islam.

Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun. Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkalis untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis.

Menurut Jasman K (tt) dari berbagai versi oral yang dikumpulkannya dan menurutnya dari sebuah buku Kisah Pelayaran Raja Kecil Ke Johor dan sebuah naskah yang berjudul "Asal –muasal Nama Terubuk" dan sebuah naskah Syair Ikan Terubuk huruf Jawi, maka dibuatnyalah sebuah kisah sejarah seperti berikut ini :

Bengkalis bermula setelah pudarnya Kerajaan Gasib pada abad ke-17 atau sekitar 1625. Kerajaan Gasib ini terletak di hulu Sungai Gasib di sebelah Selatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Buatan. Muara Sungai Gasib menuju ke Sungai Jantan Siak. Sesudah keruntuhan Kerajaan Gasib, daerah ini seperti ditimpa bala bencana. Daerah ini tidak lagi punya pemimpin, dan berlakulah "hukum rimba", siapa yang kuat maka dialah yang menjadi raja. Kekosongan pucuk kekuasaan kerajaan ini kemudian diisi oleh datuk-datuk yang menjadi tempat berpegang. Tersebutlah Datuk Bandar di Bengkalis dan Datuk Bandar di Sabak Aur. Para datuk ini diceritakan konon datang dari Johor.

Bengkalis ketika itu belumlah bernama Bengkalis, seperti halnya kejadian sebuah negeri Melayu dalam tradisi Melayu. Disebut orang Kuala Batanghari namanya. Di hulu Kuala Batanghari ini terdapat tanah busut di sebuah tasik kecil. Karena itu pula lah orang di daerah ini mengenal tanah tumpukan ini dengan sebutan "Pulau Sembilan".

Menurut Jasman K (tt) seorang guru SR dan ditulisnya pada 27 September 1980, nama Kuala Batanghari dan Pulau Sembilan kemudian kelak berganti nama menjadi Bengkalis. Peristiwa pergantian nama ini bermula setelah menghilirnya perangkat Raja Kecil yang diiringi dengan empatpuluh orang awak lancang dan empat orang kepala suku, yaitu suku Kampar, suku Tanah Datar, suku Pesisir, dan ditambah satu suku lagi dari suku Limapuluh juga. Konon dalam Sejarah Melayu Raja Kecil memang dibesarkan di Ranah Minang.

Perangkatan Raja Kecil menghiliri sungai Jantan yang kemudian nama sungai ini bernama Sungai Siak. Rombongan Raja Kecil ini singgah di Sabak Aur (Sungai Apit sekarang ini) kemudian singgah pula di Kuala Batanghari. Di Sabak Aur ini konon pernah terjadi perselisihan antara rombongan Raja Kecil dengan Datuk Bandar Sabak Aur. Perselisihan berawal dari Datuk Sabak Aur meminta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukai lalu lintas sungai kepada rombongan – yang tidak diketahuinya itu yang ternyata – Raja Kecil yang telah merapatkan lancangnya di jembatan di Sabak Aur.

Raja Kecil mau tidak mau memotong puntel pundi-pundinya yang terbuat dari emas. Lalu puntel pundi-pundi itu diterima oleh pengawal Datuk Sabak Aur. Sambil menyerahkan puntel pundi-pundinya konon Raja Kecil berkata “akan kucucup juga darahnya di kemudian hari nanti”. Ternyata konon apa yang diucapkannya itu berlaku dan menurut Jasman K mempunyai kisah tersendiri. Kisah ini masih gelap untuk diterka.

Lancang pembawa perangkatan rombongan Raja Kecil terus menghilir ke muara sungai. Awak lancang menyebut sejumlah nama hutan, nama tanjung, nama pulau, dan nama sungai-sungai yang dilalui. Tersebutlah Selat Pulau Padang. Selain itu, juga disebut Sungai Selari, Tanjung Ja, dan banyak lagi nama lain.

Jasman K (tt) selanjutnya mengisahkan, menurut adat kebiasaan setempat, bahwa setiap orang yang datang ke suatu tempat baru yang dituju di wilayah ini harus tunduk pada adat tuan rumah. Peraturan adat itu antara lain belum boleh menyauk air sungai atau naik ke darat, sebelum terlebih dahulu mengadakan surah-bersurah dan memperoleh izin dari penguasa di tempat ini. Rupanya tanpa disangka adat masyarakat ini juga diberlakukan terhadap rombongan Raja Kecil ini, yaitu belum boleh menyauk air sungai apalagi naik ke darat, sebelum surah-bersurah dan keizinan dari tuan rumah. Ketibaan macang perangkatan Raja Kecil menjadikan pembicaraan orang ramai di Bandar Kuala Batanghari. Karena orang di dalam lancang itu berbahasa sekerat-kerat yang tak dapat dipahami oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawal pantai. Apa yang didengar oleh pengawal pantai (bahasa orang di dalam lancang itu) dihafal baik-baik, supaya mudah menyampaikannya kepada Tuk Bandar.

Setelah dapat disimak ucapan bahasa atau kata-kata orang yang di dalam lancang itu lalu disampaikan oleh pengawal kepada Datuk Bandar Jamal, orang yang memegang tampuk kekuasaan di Kuala Batanghari. Terjadilah surah-surahan antara Datuk Bandar Jamal dengan Raja Kecil dan orang-orang besar di dalam lancang. Raja Kecil memperkenalkan dirinya lalu menyebutkan namanya. Mendengar nama Raja Kecil itu tak syak lagi bagi Datuk Bandar Jamal, bahwa itulah keturunan Sultan Johor. Datuk Bandar pun mempersilahkan Raja Kecil dan orang-orang besar dalam lancang untuk sudi naik ke darat dan tinggal beberapa lamanya di Kuala Batanghari.

Konon setelah beberapa lama lancang perangkatan Raja Kecil berada di Kuala Batanghari banyak sekali hal-hal yang timbul dan ditanyakan kepada Raja Kecil. Seperti ketika mandi di kuala sungai banyak ikan-ikan berebut makanan. Lalu ditanyakan nama ikan itu. Dijawab oleh Raja Kecil dengan singkat, bahwa ikan itu bernama ikan "teru" menangkapnya harus dengan tali "pu", sisiknya tidak boleh dikikis. Jika ingin dikikis juga hendaklah jangan dipaksakan. Kemudian, ditanyakan lagi nama tanjung di seberang, di sebelah Barat Laut Kuala Batanghari. Dijawab oleh Raja, bahwa tanjung itu bernama Tanjung "ja". Raja Kecil menyarankan, supaya tepat sebaiknya ditanyakan lagi kepada Bunda Dalam di Johor, orang yang dikenal pandai menafsirkan makna-makna yang tersirat.

Kelak, setelah Raja Kecil menjadi Sultan Johor, maka semua yang tumbuh dan setiap peristiwa yang terjadi di sepanjang pelayaran yang pernah dialami di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualabatanghari, ditanyakan kepada Bunda Dalam. Satu per satu dieja dan diartikan oleh Bunda Dalam, misalnya tentang "ikan teru" berarti "ikan terubuk". Ikan terubuk asal-usul induknya dari ikan Bengkalis hidup di sungai, begitu juga bentuknya tidak besar. Konon hanya di daerah ini saja yang ada ikan ini di tempat lain (mungkin ada tapi) lain pula namanya. Menangkap ikan terubuk ini hendaklah dengan tali purun dan itulah disebut tali "Pu" (dan nama "Pu" juga nama pukut). Menangkap terubuk itu hendaklah dengan pukut yang menggunakan tali purun. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ikan tersebut tidak boleh diperdagangkan.

Adapun nama kayu "beng" berasal dari nama kayu Bengkalis. Kayu itu konon cuma ada hidup di tempat itu. Batangnya hampir mirip dengan batang manggis, tetapi tidak berbuah. Dan begitu juga tentang nama Tanjung "ja" itu artinya Tanjung Jati letaknya di ujung pulau di sebelah matahari turun. Setelah mendapat arti makna dan tunjuk-ajar dari Bunda Dalam, lalu Sultan Johor yang ketika itu dipegang oleh Raja Kecil, mengirim utusan ke Kuala Batanghari menyampaikan kepada Datuk Bandar Jamal bahwa sejak perutusan itu sampai memberi khabar hendaklah berubah nama Kuala Batanghari menjadi Bengkalis, di dalam sungai itu ada hidup Ikan Bengkalis dan ditepi sungai itu ada juga hidup batang Bengkalis yang berasal dari sungai itu juga. Begitu juga nama pulau itu sekaligus diberi pula nama selatnya dengan sebutan yang sama yaitu Pulau Bengkalis dan Selat Bengkalis. Demikian penjelasan Djasman K, (tt). Bengkalis Mulai Disebut Dalam Sejarah Hanya beberapa tahun setelah tahun 1511, terbit sebuah buku tentang Melaka, yaitu The Suma Oriental. Penulisnya, Tome Pires, yang berbangsa Portugis, memberikan suatu gambaran yang jelas, khusus tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat Melaka dari tahun 1400 sehingga tahun 1515, walaupun tulisannya berorientasi dari sudut pandangannya. Kisah sejarah tersebut dibuat ketika beliau berada di kota kosmopolitan Melaka dari tahun 1512 hingga tahun 1515, yaitu tahun-tahun awal penaklukan dan pendudukan (bangsa Portugis Eropah yang pertama ini di Melaka). Mungkin disebabkan Tome Pires menyaksikan sendiri suasana pada periode awal zaman peralihan, yaitu dari pendudukan Melayu ke pendudukan Portugis, maka beliau bersikap condong ke arah Portugis, dengan mengedepankan nilai-nilai asli keportugisannya, dari segi etos, agama, kepercayaan dan pandangannya tentang dunia .

Sumber Cina pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi (daripada Dinasti Sung dan Dinasti Liang) menyebutkan bahwa sebuah tempat yang bernama Kan-t'o-li yang terletak di tenggara Sumatera (tempatny dikatakan terdapat di sekitar Jambi, bermuarakan Sungai Batang Hari. Untuk keperluan jalur perdagangan di Selat Malaka serta kemunculan pola perdagangan yang baru ini, Kan-t'o-li dipastikan berhasil untuk menguasai sebagian besar dari muara-muara sungai di sepanjang pantai timur Sumatera, hingga ke Pantai Timur dan Pantai Barat Semenanjung Tanah Melayu. Kan-t'o-li merupakan sebuah pusat kekuasaan laut Melayu yang muncul secara langsung dari peluang sosioekonomi dan jalan perdagangan laut yang muncul ketika itu. Kelahiran Kan-t'o-li menandakan wibawa politik dan keunggulan ekonomi Funan dan Langkasuka. Kan-t'o-li menggantikan kedua kekuasaan ini. Kan-t'o-lilah yang dianggap memberi jalan ke arah kemunculan Kerajaan Sriwijaya

Sriwijaya kemudian menjadi sebuah empayar Melayu. Pada zaman puncak kekuasaannya pada abad ke-11, Sriwijaya disebut menguasai jalan perdgangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jalan laut yang cukup luas, yaitu dari kawasan Gerahi di timur Teluk Benggala hingga ke Selat Sunda di selatan, lalu menguasai seluruh geopolitik tradisional pantai timur Sumatera, seluruh Thai Selatan, Semenanjung Tanah Melayu dan barat laut Gugusan Kepulauan Melayu. Sriwijaya yang berpusat di Palembang, kemudian berpindah ke Jambi juga berhasil menundukkan kekuasaan setempat dan bandar-bandar pelabuhan yang lebih kecil. Proses dan pola politik serta penguasaan jalan perdagangan laut oleh Sriwijaya ini berlangsung hingga abad ke-13.

Kawasan-kawasan lain yang tidak menjadi daerah takluk (jajahan) di pantai barat dan timur Sumatera adakalanya mempunyai hubungan perdagangan dengan Melaka. Bahan-bahan eksport dari kawasan ini dihantar ke Melaka melalui pelabuhan yang menjadi daerah takluk (jajahan). Pedir contohnya, menghantar lada dan beras menerusi Pasai ke Melaka. Bengkalis membekalkan ikan kering dan ikan terubuk .

Pada tahun 1678 digambarkan oleh Tuan Bort tempat tersebut sebagai berikut : Bengkalis, sebagaimana telah dihuraikan, termasuk dalam wilayah Kerajaan Johor, terletak di suatu pulau kira-kira satu mil dari pantai Sumatera, hanya merupakan perkampungan nelayan , dipimpin oleh seorang syahbandar yang mengurus semua kepentingan Johor.

Meskipun hanya merupakan perkampungan nelayan, disana terdapat pelayaran yang ramai terdiri dari orang Melayu, Jawa dan Arab yang berkumpul untuk melakukan pembelian barang-barang dari Pantai Jawa, Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelang, Johor, Pahang, Patani, Siam, Kamboja, dan Kocin Cina. Bahkan, orang Minangkabau yang tinggal di Sumatera datang ke

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sana beramai-ramai membeli garam, beras dan juga ikan, yang banyak ditangkap pada musim-musim tertentu disana oleh orang-orang Selat, yang dengan anak istrinya tinggal di pulau-pulau dan mengembara kesana kemari-ikan tersebut mempunyai telur yang bersih, dikeringkan dan digarami serta sangat digemari oleh penduduk.¹⁶

B. Demografi Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 8.403,28 km². Ibu kota kabupaten ini berada di kota Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatra. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri, yang berada di kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore *Growth Triangle* (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT). Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatra yang mencakup area seluas 8.403,28 km² dengan batas sebagai berikut :

Utara : Selat Malaka

Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun

Selatan: Kabupaten Siak

¹⁶ . <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/3>. Diakses 29 maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

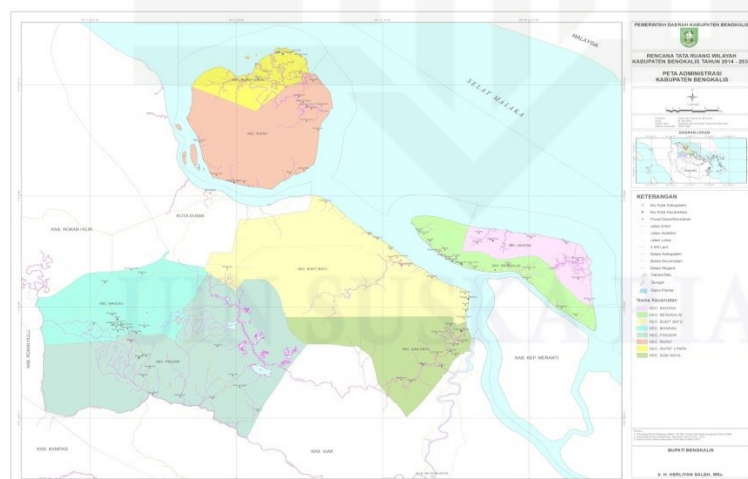
Barat : Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 Pulau besar dan kecil. Beberapa di antara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan Pulau Bengkalis (938,40 km²).

Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26 °C – 32 °C. Musim hujan biasa terjadi sekitar bulan September – Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 - 4.078 mm/tahun. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis



Sumber Google, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°30' Lintang Utara (LU), -0°17' Lintang Utara atau 100°52' Bujur Timur (BT), -102°52' Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km², meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri – Bengkalis 106 kilometer, Dumai-Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.

Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (ferry) yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari. Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm/tahun dengan temperatur udara berkisar antara 26°-32°C. Musim kemarau di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Pebruari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam tahun sekitar 1734 mm/tahun dan jumlah hujan terendah adalah 773 mm/tahun.

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.

Jarak kota Bengkalis dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.

Topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagaian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau Bengkalis cekung). Pada bagian tengah pulau ini dilapisi oleh gambut dengan kedalaman mencapai 2 meter. Selain itu juga terdapat hutan rawa yang luasnya semakin lama semakin berkurang.

Kota Bengkalis sebagai ibukota Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang baru saja berkembang. Namun secara historis Bengkalis pernah memegang peranan penting dalam sejarah. Sehubungan dengan itu, di Kota Bengkalis ini banyak ditemukan bangunan-bangunan bersejarah dan rumah-rumah tua walaupun banyak diantaranya sudah punah maupun tidak utuh lagi. Dalam perkembangannya Kota Bengkalis dihuni oleh berbagai suku bangsa terutama Melayu, Cina, Jawa, Minang, dan Batak disamping suku bangsa lainnya yang merupakan penduduk minoritas.

Masyarakat Melayu Bengkalis beragama Islam dan dalam kesehariannya identik dengan budaya Islam. Upacara-upacara tradisionalnya cenderung dengan tradisi Islam dan juga nilai-nilai kehidupan bernuansa Islami. Sehubungan dengan itu dalam falsafah Melayu disebutkan bahwa "Melayu adalah Islam, apabila tidak Islam berarti tidak Melayu".¹⁷

C. DPRD Kabupaten Bengkalis

1. DPRD Kabupaten Bengkalis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

¹⁷.<http://wartasejarah.blogspot.com/2015/12/sejarah-terbentuknya-kabupaten-bengkalis.html> . Diakses 31 maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (disingkat DPRD Bengkalis) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. DPRD Bengkalis memiliki 45 anggota yang tersebar di 11 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.¹⁸

Tabel 2.2
Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI POLITIK
1	Ketua	H. Khairul Umam	Partai Keadilan Sejahtera
2	Wakil Ketua I	Syahrial	Partai Golongan Karya
3	Wakil Ketua II	Kaderismanto	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Wakil Ketua III	Syaiful Ardi	Partai Amanat Nasional

¹⁸.https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Bengkalis. Di akses pada 31 maret 2021

Table 2.3

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah kursi dalam priode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	1	3
GERINDRA	5	6
PDI PERJUANGAN	5	6
GOLKAR	8	8
NASDEM	3	3
PKS	6	8
PERINDO	0	(baru) 1
PPP	2	1
PAN	8	6
HANURA	2	0
DEMOKRAT	4	2
PBB	1	1
PKIP	1	0
Jumlah Anggota	45	45
Jumlah partai politik	12	11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 2.4

Nama nama anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menurut partai politiknya

no	Partai politik	Nama anggota
1	PKS	1. H. Samsu Dalimunthe 2. SANUSI 3. H. Adri 4. H.Abi Bahrin 5. H. Khairul Umam 6. Hi.Zahrani
2.	PKB	1. Irmu Syakip Arsalan 2. Sugianto 3. Surya Budiman
3	PAN	1. H.Abdul Kadir 2. Rianto 3. Syaiful Ardi 4. Indra Wansyah 5. H. Zamzami
4	PDIP	1. Sofyan 2. Kaderismanto 3. Erwan 4. Ferry Situmeang 5. Simon Lumbon Gaol
5	GERINDRA	1. Zamzami Harun 2. Romel Sinalsal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		3. Andi pahlevi 4. Adihan 5. Elman 6. H.Arianto
6.	GOLKAR	1. Rahmah Yenny 2. Ruby Handoko Alias Akok 3. Al Azmi 4. H.Asmara 5. Syafroni Untung 6. Hendri, M.Si 7. Syahrial, M.Si 8. Septian Nugraha
7.	NASDEM	1. Rosmawati Sinambela 2. Mustar J Ambarita 3. Askori
8.	DEMOKRAT	1. Morison Bationg Sihite 2. Nanang Haryanto
9.	PERINDO	1. Asrijal
10.	PBB	1. H.Mawardi
11.	HANURA	-
12.	PPP	1. Firman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 2.5

Jumlah produk hukum kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018

No	Produk hukum	2017	2018
1.	Peraturan Daerah	5	8
2.	Keputusan DPRD	34	-
3.	Keputusan Dimpinan DPRD	2	-
4.	Peraturan Bupati	103	69
5.	Keputusan Bupati	519	587
6.	Keputusan Daerah	9	-

D. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

Setiap organisasi atau instansi pemerintahan diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian kedepannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap dalam pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya.

Adapun visi dan misi dari Kabupaten Bengkalis diantaranya sebagai berikut:

a. Visi

" Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia "

b. Misi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
- b) Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
- c) Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.
- d) Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spesial, yakni:
 - 1) Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun.
 - 2) Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat.
 - 3) Gerbang Permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.

- 4) Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

E. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen *output* dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan. Kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya. Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebanyak 553.938 jiwa terdiri dari 284.262 laki-laki (51,32 persen) dan 269.676 perempuan (48,68 persen). Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*). *Sex ratio* Penduduk Kabupaten Bengkalis sebesar 105. Dimana jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Penduduk Kabupaten Bengkalis sangat *heterogen* dengan mayoritas beragama islam. Selain suku Melayu yang merupakan suku mayoritas,

penduduk Kabupaten Bengkalis berasal dari berbagai suku bangsa, seperti Aceh, Banjar, Batak, Bugis, Jawa, Minang, Sunda dan Tionghoa.¹⁹

Table 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Sex Rasio di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

NO	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%	Sex Rasio
		N(jiwa)	%	N(jiwa)	%			
1.	Bengkalis	41.6947	75,3	40.417	7,3	82.111	14,82	103
2.	Bantan	21.331	3,85	20.417	3,64	41.472	7,49	106
3.	Bukit batu	10.666	1,93	10.279	1,86	20.945	3,78	104
4.	Mandau	77.297	13,95	73.509	13,27	150.806	27,22	105
5.	Rupat	17.005	3,07	16.111	2,91	33.116	5,98	106
6.	Rupat utara	7.070	1,28	6.713	1,21	13.783	2,49	105
7.	Siak kecil	12.358	2,23	11.761	2,12	24.119	4,35	105
8.	Pinggir	31.443	5,68	29.493	5,32	60.936	11	107
9.	Bandar laksmana	7.738	1,4	7.219	1,3	14.957	2,7	107
10.	Talang mandau	11.884	2,15	10.856	1,96	22.740	4,11	109
11.	Bathin solapan	45.776	8,26	43.177	7,79	88.953	16,06	106
Jumlah		284.262	51,32	296.676	48,68	553.938	100	105

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa (dari total 166 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa di seluruh Riau).

Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 537.142 jiwa dengan luas wilayahnya 6.975,41 km² dan sebaran penduduk 77 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut:

¹⁹.https://statistik.bengkaliskab.go.id/media/file/5946052349120201204_Buku_Statistik_Sektoral_2020.pdf. Diakses pada 31 maret 2021.

Tabel 2.7

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis

No	Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
1	14.03.01	Bengkalis	3	28	Desa	Kelurahan: bengkalis kota,damon,rimba sekampung Desa: Air Putih, Kelapapati ,Kelemantan,Ketam Putih, Meskom, Pangkalan Batang, Pedekik Pematang, Duku Penampi, Penebal, Sebauk ,Sei Alam, Sekodi, Senggoro, Teluk Latak, Temeran, Wonosari,
2	14.03.02	Bantan	1	23	Desa	Kelurahan : selat baru Desa: Bantan Air, Bantan Tengah,Bantan Tua, Jangkang, Kembung Luar, Kembung Dalam, Muntai ,Teluk Lancar, Teluk Pambang,

3	14.03.03	Bukit Batu	1	9	Desa	<p>Kelurahan:</p> <p>Sungai Pakning</p> <p>Desa:</p> <p>Api-Api, Bukit Batu, Bukit Kerikil, Buruk Bakul, Dompas, Pangkalan Jambi, Parit I Api-Api, Sejangat, Sepahat, Sukajadi, Sungai Selari, Tanjung Leban, Temiang, Tenggayun,</p>
4	14.03.09	Mandau	9	2	Desa	<p>Kelurahan:</p> <p>Air Jamban, Babussalam, Balai Makam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi,</p> <p>Desa:</p> <p>Balik Alam, Bumbung Harapan, Baru Kesumo .Ampai Petani, Sebangar,</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5	14.03.10	Rupat	4	12	Desa	<p>Kelurahan: Batu Panjang, Pergam, Tanjung Kapal ,Terkul,</p> <p>Desa: Darul Aman ,Hutan Panjang, Makeruh, Pangkalan Nyirih ,Parit Kebumen, Sukarjo Mesin, Sungai Cingam, Teluk Lecah, Sri Tanjung, Dungun Baru ,Pancur Jaya, Pangkalan Pinang,</p>
6	14.03.11	Rupat Utara	0	8	Desa	<p>Desa: Tanjung Medang, Teluk Rhu, Tanjung Punak, Puteri Sembilan, Kadur ,Titi Akar, Hutan Ayu, Suka Damai,</p>
7	14.03.12	Siak Kecil	0	17	Desa	<p>Desa: Bandar Jaya, Langkat, Lubuk Garam, Lubuk Gaung, Lubuk Muda, Muara Dua, Sadar</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau	14.03.13	Pinggir	2	8	Desa	Jaya, Sepotong, Sumber Jaya, Sungai Limau, Sungai Siput, Tanjung Belit, Tanjung Damai,
						Kelurahan: Balai Raja, Titian Antui, Desa: Beringin, Balai Pungut, Melibur, Muara Basung, Kuala Penaso, Pinggir, Semunai, Serai Wangi, Tasik Serai, Tenggana, Tasik Serai Timur,
						Desa: Api-Api, Bukitkerikil, Paritsatu, api-api, Sepahat, Tanjungleban, Temiang, Tenggayun,
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	14.03.14	Bandar Laksmana	0	7	Desa	Desa: Api-Api, Bukitkerikil, Paritsatu, api-api, Sepahat, Tanjungleban, Temiang, Tenggayun,
						Desa: Beringin, Koto Pait, Beringin, Kuala,
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	14.03.15	Talang Mandau	0	9	Desa	Desa: Beringin, Koto Pait, Beringin, Kuala,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	© Hak cipta milik UIN Suska Riau					Penaso, Melibur, Serai Wangi ,Tasik Serai ,Tasik Serai Barat, Tasik Serai Timur, Tasik Tebing Sera,
	11	14.03.16	Bathin Selopan	0	13	Desa: Air kulim, Balai makam, Bathin sobanga, Boncah mahang, Buluh manis ,Bumbung, Kesum boampai ,Pamesi ,Pematang obo, Petani, Sebangar, Simpang padang, Tambusai,batang dui,
TOTAL			19	136		

F. Pendidikan

333 Sekolah Dasar, 21 Madrasah Ibtidaiyah, 95 Sekolah Menengah Pertama, 52 Madrasah Tsanawiyah, 43 Sekolah Menengah Atas, 31 Madrasah Aliyah, 20 Sekolah Menengah Kejuruan dan 7 Perguruan Tinggi. Sedangkan tenaga pengajar di Kabupaten Bengkalis sebanyak 488 orang guru Taman Kanak-kanak, 4.575 orang guru Sekolah Dasar, 285 guru Madrasah Ibtidaiyah, 1.704 orang guru Sekolah Menengah Pertama, 963 guru Madrasah Tsanawiyah, 1.154 orang guru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Menengah Atas, 613 guru Madrasah Aliyah, 314 orang guru Sekolah Menengah Kejuruan dan 283 dosen. Jumlah murid Taman Kanak-kanak di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 sebanyak 5.055 orang, murid Sekolah Dasar sebanyak 72.531 orang, 3.539 orang murid Madrasah Ibtidaiyah, 21.947 orang murid Sekolah Menengah Pertama, 6.972 orang murid Madrasah Tsanawiyah, 16.755 orang murid Sekolah Menengah Atas, 2.711 orang murid Madrasah Aliyah, 3.516 orang murid Sekolah Menengah Kejuruan dan 5.404 mahasiswa.

Table 2.8
Jumlah Sekolah, murid dan guru SD di Kabupaten Bengkalis tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Total Siswa	Guru Laki-laki	Guru Perempuan	Total Guru
Bantan	32	2.243	1.997	4.240	273	388	661
Bengkalis	59	5.468	5.075	10.543	449	1.094	1.543
Bukit Batu	32	2.567	2.320	4.887	171	476	647
Mandau	102	17.943	16.411	34.354	363	2.261	2.624
Rupat	34	2.509	2.365	4.874	256	409	665
Rupat Utara	13	1.157	1.152	2.309	89	112	201
Pinggir	44	6.947	6.327	13.274	180	754	934
Siak Kecil	21	1.549	1.435	2.984	140	254	394

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis BPS Kabupaten Bengkalis
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis

Table 2.9

**Jumlah Sekolah, Murid dan Guru MI di Kabupaten Bengkalis tahun
2016**

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Total Siswa	Guru Laki-laki	Guru Perempuan	Total Guru
Bantan	4	229	170	399	23	41	64
Mandau	12	1.285	1.183	2.468	21	129	150
Pinggir	5	667	597	1.264	6	39	45

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis BPS Kabupaten
Bengkalis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table.2.10
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru MTS di Kabupaten Bengkalis
tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Total Siswa	Guru Laki-laki	Guru Perempuan	Total Guru
Bantan	9	616	566	1.182	68	91	159
Bengkalis	9	1.015	981	1.996	80	139	219
Bukit Batu	3	309	287	596	21	34	55
Mandau	12	1.324	1.134	2.458	59	120	179
Rupat	6	232	245	477	40	47	87
Rupat Utara	1	59	65	124	4	7	11
Pinggir	9	441	468	909	36	65	101
Siak Kecil	2	46	51	97	7	19	26

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis BPS Kabupaten Bengkalis
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis*

Table.2.11

**Jumlah sekolah ,murid dan guru SMP di kabupaten bengkalis tahun
2016**

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Total Siswa	Guru Laki-laki	Guru Perempuan	Total Guru
Bantan	8	611	632	1.243	90	119	209
Bengkalis	14	1.600	1.470	3.070	133	351	484
Bukit Batu	9	842	773	1.615	60	151	211
Mandau	28	6.672	6.339	13.011	172	945	1.117
Rupat	10	805	795	1.600	74	85	159
Rupat Utara	4	354	400	754	24	30	54
Pinggir	20	2.748	2.566	5.314	93	323	416
Siak Kecil	5	509	482	991	45	86	131

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis BPS Kabupaten Bengkalis
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis

Table.2.12

Jumlah sekolah ,murid dan guru SMA di kabupaten bengkalis tahun

2016

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Total Siswa	Guru Laki-laki	Guru Perempuan	Total Guru
Bantan	3	465	520	985	66	67	133
Bengkalis	6	1.148	1.272	2.420	124	253	377
Bukit Batu	3	558	607	1.165	42	81	123
Mandau	16	4.127	5.004	9.131	144	673	817
Rupat	5	547	577	1.124	43	61	104
Rupat Utara	1	66	136	202	12	25	37
Pinggir	10	1.272	1.576	2.848	46	183	229
Siak Kecil	2	252	334	586	30	61	91

*Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten BengkalisBPS Kabupaten Bengkalis
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.*

Table.2.13

Jumlah sekolah ,murid dan guru MA di kabupaten bengkalis tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Total Siswa	Guru Laki-laki	Guru Perempuan	Total Guru
Bantan	7	340	328	668	53	67	120
Bengkalis	6	287	487	774	59	82	141
Bukit Batu	2	107	101	208	15	23	38
Mandau	8	355	447	802	42	68	110
Rupat	3	77	76	153	15	26	41
Rupat Utara	1	9	14	23	6	4	10
Pinggir	3	77	90	167	9	12	21
Siak Kecil	2	14	47	61	10	11	21

Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten BengkalisBPS Kabupaten Bengkalis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.

Table. 2.14

Jumlah sekolah ,siswa ,guru SMK di kabupaten bengkalis 2016

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Total Siswa	Guru Laki-laki	Guru Perempuan	Total Guru
Bantan	1	70	56	126	17	8	25
Bengkalis	4	582	405	987	72	73	145
Bukit Batu	2	257	60	317	29	22	51
Mandau	11	1.986	1.075	3.061	108	202	310
Rupat	1	160	131	291	22	15	37
Rupat Utara	2	114	108	222	12	11	23
Pinggir	4	498	241	739	30	44	74
Siak Kecil	1	95	39	134	17	19	36

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis BPS Kabupaten Bengkalis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.



Table . 2.15

Jumlah kampus ,mahasiswa dan dosen di kabupaten bengkalis tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Perguruan Tinggi	Mahasiswa Laki-laki	Mahasiswa Perempuan	Total Mahasiswa	Dosen Laki-laki	Dosen Perempuan	Total Dosen
Bengkalis	3	2.023	2.162	4.185	167	76	243
Mandau	3	382	576	958	28	38	66

Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten BengkalisBPS Kabupaten Bengkalis Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.²⁰

G. Keagamaan

Berdasarkan data dari Departemen Agama Kabupaten Bengkalis, pada tahun 2013 terdapat 422 unit masjid, 660 unit surau, 234 unit gereja, dan 55 wihara/klenteng. Selama 2013, jumlah orang yang melaksanakan pernikahan tercatat sebanyak 4.043 pasang. Jumlah hewan kurban pada tahun 2013 sebanyak 1.354orang,dan yang berangkat menunaikan ibadah haji sebanyak 453 orang.

²⁰ . <https://statistik.bengkaliskab.go.id/sekolah/pendidikantahun/9/8>. Diakses pada 31 maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tab le. 2.16

**Jumlah sarana ibadah di kabupaten bengkalis mulai dari tahun 2014
2019**

No	Data	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Masjid	422	422	422	571	584	649
2	Mushola	660	660	660	495	508	564
3	Gereja Kristen	-	-	-	239	-	171
4	Gereja Katolik	-	-	-	16	-	-
5	Pura	-	-	-	-	-	-
6	Vihara dan Klenteng	55	55	55	100	-	62

H. Adat istiadat

Adat dapat diartikan sebagai suatu cara hidup masyarakat yang terdiri dari makhluk manusia yang diberikan tuhan dengan akal. Cara hidup sesebuah masyarakat dituangkan dalam peraturan dalam masyarakat yang dijadikan pedoman hidup bagi seluruh anggota masyarakat tersebut. Sedangkan definisi istiadat adalah meliputi adat kebiasaan, resam, dan juga dapat diartikan sebagai upacara dan peralatan. Oleh karena itu, apabila adat dan istiadat digabungkan, maka ia membawa pengertian suatu peraturan yang diikuti dalam masyarakat dan juga kebiasaan-kebiasaan yang dipakai disamping terdapatnya upacara-upacara dan peralatan tertentu dalam menjalankan peraturan-peraturan dimaksud. Adat istiadat menampakkan satu pola perlakuan anggota masyarakat didalam sesebuah kelompok, wilayah atau negeri. Dia merupakan kebiasaan

yang disukai dan diakui oleh masyarakat. Adapun suku adat di Kabupaten Bengkalis adalah masyarakat suku hutan yang terdapat di desa kembung luar kecamatan bantan kabupaten bengkalis, terdapat beberapa adat-istiadat yang masih kekal dan diamalkan mereka dari dahulu hingga hari ini. Amalah pada adat-istiadat tersebut diwarisi dari turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan terus menerus dan dipertahankan atau dikekalkan, terdapat adat dan kepercayaan *animisme* yang menyebabkan mereka melaksanakan berbagai upacara dan lainnya masih tetap dipertahankan oleh para anggota masyarakat walaupun sudah banyak mengalami penyesuaian dengan kondisi saat ini. Sebagai suatu system sosial, adat yang diciptakan oleh manusia sudah tentu mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan dibandingkan dengan peraturan hidup yang ditetapkan oleh agama. Perubahan-perubahan sudah mulai kelihatan terjadi pada masyarakat mengingat mereka sudah mulai terbuka dengan budaya baru yang ada disekitar kehidupan mereka, terutama dalam hal perkawinan dengan etnik lainnya dan perubahan agama. Hal ini kalau ditinjau dari sisi adat ini, terdapat banyak persamaan antara adat perpatih dan adat istiadat yang diamalkan oleh Suku Hutan di Desa Kembung Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan adat istiadat etnik Melayu secara keseluruhan.²¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹. Willy Herdianto Surya Jurnal *AKRAB JUARA* Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016
(114) *EKSISTENSI ADAT ISTIADAT SUKU HUTAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI*
(Studi Kasus di Desa Kembung Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)

BAB III

LANDASAN TEORI TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM ISLAM

A. Pengertian Legislasi

Legislasi atau undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa Belanda nya, disebut dengan *theorie van de wetgeving* atau disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang. Menurut Anis Ibrahim menjelaskan pengertian legislasi adalah sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan).²² Sebelum disahkan undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai *otoritas* (hak untuk bertindak), Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin bisa juga ditolak. Adapun tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undang atau legislasi di Indonesia, yang meliputi:

1. Perencanaan, merupakan proses, perbuatan atau cara merencanakan peraturan perundang-undangan. Merencanakan adalah kegiatan untuk membuat konsep dan merancang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

²². <https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-legislasi/>. Diakses pada 31 maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyusunan, tahap penyusunan merupakan tahap untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan.
3. Pembahasan, tahap pembahasan merupakan untuk mengupas, membicarakan, memperdebatkan, mengkritik dan membantahi peraturan perundang-undangan yang telah disusun.
4. Pengesahan, tahap pengesahan atau penetapan adalah merupakan tahap untuk menyatakan, mengakui, membenarkan dan menetapkan (tidak berubah, meneguhkan, dan menguatkan) peraturan perundang-undangan.
5. Pengundangan, tahap pengundangan merupakan tahap penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

Pada hakikatnya, penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kepentingan manusia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus dapat dilaksanakan, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Untuk menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan harus memerhatikan asas-asas hukum yang baik. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk

menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.²³

Dalam kajian fiqih siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga *Al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut islam tidak ada seorang pun yang berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat *Al-an'am* ayat 57.²⁴

yang berbunyi:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ
الْحُكْمَ لِلَّهِ ۖ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Yang artinya:

Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”²⁵

B. Fungsi Legislasi DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan *efisiensi, efektifitas produktivitas* dan

²³ . <https://jdih.magean.go.id/?p=865>. Diakses pada tanggal 31 maret 2021

²⁴ .Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , (Jakarta:2014,Kencana).

Edisi Pertama , cet. ke-1,h.187

²⁵ . <https://www.merdeka.com/quran/al-anam/ayat-57> diakses pada tanggal 30 mei 2021

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pasal 20A ayat (1) menyatakan, DPR/DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara²⁶, yang memiliki fungsi antara lain:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang dan peraturan daerah yang dibahas bersama presiden, gubernur, walikota / bupati untuk mendapat persetujuan bersama.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) / (APBD) bersama Presiden, Gubernur, Wali kota/Bupati.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD RI 1945, undang-undang, dan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka *representasi* rakyat di daerah.²⁷

Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan

²⁶. Titik Triwulan Tutik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, J(akarta:2010), Edisi Pertama, cet. ke-1 h.193

²⁷ https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109 .Diakses pada tanggal 31 Maret 2021.

Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Prosedur dan proses pembuatan undang-undang untuk perda, sebagai berikut :

1. Inisiatif Pembentukan Perda Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Bupati. Apabila dalam satu kali masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda.
2. Asas Pembentukan Perda Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :
 - a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - i. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
 - j. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan. Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.
3. Proses Penyusunan Perda Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:
- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda, terdiri penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda.
 - b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
 - c. Proses pengesahan oleh Bupati dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

C. Hak dan Kewajiban DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berdasarkan pasal 20A ayat

(2) UUD 1945 jo. Pasal 27 UU No.22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan

MPR,DPR,DPD dan DPRD menyatakan sebagai lembaga perwakilan rakyat DPRD memiliki hak, antara lain:

1. Hak Interpelasi

Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud adalah DPRD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hak Angket

Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Sementara di luar hak institusi, anggota DPR juga memiliki hak diantaranya: (1) mengajukan RUU,(2) mengajukan pertanyaan,(3) menyampaikan usul dan pendapat, dan (4) imunitas.

D. Tugas dan Wewenang DPRD

Amandemen UUD 1945 telah menempatkan DPR sebagai lembaga legislasi yang sebelumnya berada di tangan presiden. Dengan demikian DPR memiliki

fungsi politik yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan.

Dalam tugas dan wewenang keberadaan DPR sangat dominan, karna kompleksitas dalam tugas dan wewenang tersebut yaitu :

1. DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap RUU di bahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
3. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
4. Presiden mengesahkan RUU yang telah di setujui bersama untuk menjadi UU.
5. Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama untuk tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU itu di setujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib undangkan.

Selain berkaitan dengan proses legislasi, dalam kewenangannya DPR sebagai penentu kata putus dalam bentuk memberi “persetujuan” terhadap agenda kenegaraan yang meliputi: (1) menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan Negara lain. (2) membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, (3) menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, (4) pengangkatan hakim agung, (5) pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial. Agenda kenegaraan lain yang memerlukan “pertimbangan” DPR antara lain: (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkatan duta, (2) menerima penempatan duta negara lain, (3) memberi amnesti dan abolisi.

Kekuasaan DPR semakin komplis dengan adanya kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan, seperti: (1) memilih anggota badan pemeriksaan keuangan, (2) menentukan 3 dari 9 orang hakim konstitusi dan, (3) menjadi institusi yang paling menentukan dalam proses pengisian lembaga *non-state* lainnya (*auxiliary bodies*) seperti komisi nasional HAM, komisi pemilu. Selain juga adanya keharusan untuk meminta pertimbangan DPR dalam pengisian jabatan panglima TNI, kepala kepolisian Negara RI (Kapolri).

E. Kajian Fiqih Siyasah

1. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi 5 bidang, ada yang menetapkan 4 bidang atau 3 bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi 8 bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian mencakup kebijaksanaan pemerintahan tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah iddariyyah* (administrasi Negara).

Adapun Imam Ibn Tammiyah meringkasnya menjadi 4 bagian yaitu, *siyasah*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

qadhaiyyah, (peradilan), *siyasah iddariyyah* (administrasi Negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara *abd al- wahhab khallaf* di dalam kitabnya berjudul *al-siyasah al-syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bagian bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi 8 bidang yaitu, *siyasah dusturiyyah syar'iyah* (politik pembuatan undang-undang), *siyasah tasri'iyah syar'iyah* (politik hukum), *siyasah qadha'iyah syar'iyah* (politik peradilan), *siyasah maliyyah syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter), *siyasah idariyyah syar'iyah* (politik administrasi Negara), *siyasah dauliyyah/ siyasah kharijiyyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang undangan), *siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas pembagian fiqih siyasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok. Pertama ,politik perundang undngan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/ siysah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang non muslim yang perbedaan kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internasional dan hubungan diplomatik antara Negara muslim dan Negara non muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga denganb hukum internasional. Ketiga politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) antara lain membahas sumber keuangan Negara ,pos-pos pengeluaran dan belanja Negara,perdagangan internasional,kepentingan /hak-hak publik, pajak, dan perbangkan.²⁸

2. Sumber Kajian Fiqih Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntunan dan tantangan zaman.demikian juga dengan fiqih siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmufiqih, fiqih siyasah mempunyai sumber-sumber yang di rujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar sumber fiqih siyasah dapat di bagi menjadi sumber primer dan sumber skunder. Fathiyah al-nabrawi membagi sumber fiqih siyasah menjadi tiga bagian yaitu, Al-qur'an dan al- sunnah ,sumber-sumber yang tertulis selain al-qur'an dan al-sunnah serta sumber-sumber peninggalan kaum muslimin terdahulu.

selain sumber al- qur'an dan al- sunnah ahmad Sukarja mengungkapkan sumber kajian fiqih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, *Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat ,pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

²⁸ . ibid Muhammad Iqbal,*Fiqih Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,h.14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar Negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan, situasi, kondisi, budaya dan tantangan- tantangan yang di hadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsive terhadap perkembangan masyarakat.²⁹

Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah, dengan metode-metodenya kita dapat menilai pemikiran pemikiran dan praktek kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah islam. Di samping itu metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. Metode kajian fiqh siyasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode usul fiqh antara lain adalah *Qiyas*, *istihsan*, *urf*, *adah*, *mashlahah mursalah* dan *istishhab*. Dengan metode ini umat islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi.³⁰

²⁹ .ibid Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* .,h.16

³⁰ .ibid Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ,h.17

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan islam karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau pengadilan, orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat islam yaitu al-qur'an dan sunnah nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam tersebut, oleh karena itu dalam hal terdapat dua fungsi lembaga legislatif yaitu pertama dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *nash* al-qur'an dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sultahah al-tayri'iyah* adalah undang-undang *ilahiyyah* yang disyariatkannya dalam al-qur'an dan dijelaskan oleh nabi SAW dalam hadis, adapun fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Disini perlunya lah *Al-sultahah Al-tayri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan *Nash*, *ijtihad* anggota legislatif harus mengacu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada prinsip *jalb al-maslahalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat, agar hasil peraturan yang akan di un dangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Kalau terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak bisa lagi mematuhi perkembangan tersebut maka badan legislatif berwenang untuk meninjau nya kembali dan mengganti nya dengan undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam lembaga legislatif ini para anggotanya akan berdebad dan bertukar pikiran untuk menentukan undng-undang bru untuk di berlakukan di dalam masyarakat.³¹

Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan Negara dalam masalah ini lembaga legislatif berha mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan Negara kepada kepala Negara selaku pelaksana pemerintah (*Al- Sulthah Al-Tanfidziyah*) dalam jangka waktu tertentu lembaga legislatif akan meminta pertanggung jawaban dan laporan keuangan Negara. Dan lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.³²

³¹ .Muhammad Iqbal, *ibid.* h.188-189

³² .ibid, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* h.190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara masyarakat dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Dalam sejarah islam, siyasah telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad setelah beliau berada di Madinah. Di sini Nabi menjalankan dua fungsi sekaligus, sebagai Rasul utusan Allah dan sebagai kepala negara madinah. setelah beliau wafat, fungsi kedua ini dilanjutkan oleh *al khulafa' al-rasyidun*.³³

Berangkat pada praktik yang dilakukan *al-khulaf'aul rasyidun* inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang *ahl al-hall wa al-'aqd*. menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda yaitu, pertama dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara, kedua pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih, ketiga pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* melalui seleksi dalam masyarakat, keempat pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.

Al-mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. Dalam hal ini, al-mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kepala

³³. <http://deviapriyanti158.blogspot.com/2012/03/kajian-fiqh-siyasah-dan-perkembangannya.html> diakses pada tanggal 23 juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaanya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara.

Dalam sejarah Islam, istilah *ahl al-hall wa al-'aqd* sendiri sebenarnya tidak lahir pada zaman nabi muhammad saw ataupun zaman khulafaurrasyiddin, lembaga ini baru muncul ketika zaman abbasiyah atau bani abbas yang berpusat di kota baghdad (sekarang ibu kota irak), pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan bani umayyah di spanyol. Khalifah al-hakam ii (961-976 m) membentuk majelis al-syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintahan. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis ini yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi, daulat umayyah ii di spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik islam sejak zaman mu'awiyah yang berkuasa di damaskus. Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyak permasalahan kenegaraan yang harus diputus secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.³⁴

Dalam fiqh siyasah konstitusi disebut juga dengan *dusturi* kata ini berasal dari bahasa Persia semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) . setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar ,atau pembinaan. Menurut istilah *Dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah di serap kedalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara. Menurut *abdul wahhab khallaf* prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam merumuskan undang-undang dasar ini adalah

³⁴ . Muhammad Iqbal. *Ibid.* h.177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membedakan stratifikasi social , kekayaan, pendidikan, dan agama.³⁵

Menurut ulama fiqih siyasah pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian hubungan antara kedua belah pihak berbeda-beda pada masing-masing Negara, sesuai dengan perbedaan di masing masing Negara , akan tetapi karna adat istiadat tidak tertulis maka hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing masing pihak. Akibatnya karena pemerintah memegang kekuasaan tidak jarang pemerintah bersikap absolut otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan ,bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut.

Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Namun tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi ,ada juga pembuatan konstitusi di dasarkan karna lahirnya sebuah Negara baru.³⁶

Dalam hal ini pendiri Negara lah yang terlibat aktif dalam merumuskan undang-undang dasar bagi Negara mereka. Pada mas modern

³⁵. Muhammad iqbal. *Ibid.* h.178

³⁶. Muhammad iqbal .*ibid.* h.179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh ini dapat dilihat pada Negara Palestina dan Indonesia.³⁷ Dikalangan pakar islam terdapat perbedaan dalam menanggapi permasalahan Syura dan demokrasi sebagian memandang syura dan demokrasi adalah dua hal yang identik sebagian lainnya memandang sebagai dua konsep yang berlawanan sedangkan yang lain juga memandang bahwa keduanya mempunyai persamaan yang erat, namun terdapat juga perbedaan-perbedaan.

Kata “Syura” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah, sejalan dengan pengertian ini kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjafi musyawarah mengandung maksa segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Adapun ayat Al-Qur’an dalam surah Asy- Syura, ayat :38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Yang artinya :

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,(asy-syura ayat:38).³⁸

Allah menggambarkan sifat orang mukmin yang salah satunya adalah mementingkan musyawarah dalam setiap persoalan yang mereka hadapi (wa

³⁷ .Muhammad Iqbal, *ibid.* h.180

³⁸ . <https://www.liputan6.com/quran/asy-syura/38> diakses pada 15 juli 2021



amruhum syura baynahum). Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat islam. Sebagaimana halnya syura , demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang di artikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.³⁹

Syura dan demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara musyawarah, sehingga dapat mengeliminasi kekeliruan, yang lebih penting kedua prinsip ini sama sama menolak segala bentuk kediktatoran, kesewenang wenangan ,dan sikap eksploitatif pemerintah yang berkuasa. Bagaimana pun kedua-duanya merupakan konsep yang berbeda secara prinsip maupun aplikatif, secara prinsip konsep syura berasal dari “langit” yang di wahyukan Allah pada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sedangkan demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari barat. Dari segi aplikatifnya pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari budaya barat yang dalam beberapa sisi jelas-jelas berbeda dengan nilai ajaran islam.⁴⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ . Muhammad Iqbal ,*ibid*.h.220

⁴⁰ . Muhammad Iqbal,*ibid*. h..220

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Penyusunan Perda Kabupaten Bengkalis jika ditinjau dari fiqh siyasah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, dimana perbedaan tersebut terlihat dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan, kemudian persamaannya adalah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan seluruh masyarakat.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada para anggota DPRD supaya dapat lebih memaksimalkan fungsinya, terutama dalam bidang legislasi.
2. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam fiqh siyasah.



DAFTAR PUTAKA

Buku- Buku

- Amiruddin Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Wali Persada, 2003). cet. ke-1
- Abdullah Syukur, Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansi Dalam Pembangunan, Ujung Padang ,Persadi ,1987.
- Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,(Jakarta: Kencana, 2016), cet-2
- Hartono Metodologi Penelitian,(Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi ,tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,(Jakarta Kencana,2011), edisi ke-1, cet ke-1.
- Jimly Asshiddiqie Pengantar Ilmu Hukum tata Negara , Jakarta: Raja Wali Pers, 2011. cet. ke-3,
- Kriyantono, Rachmat,. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. (Jakarta: kencana 2006).
- Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Moh.Mahfud MD,Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta:Rajawali pers,2012),
- Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2004), edisi pertama
- Muhammad Iqbal,Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,Jakarta:2014,Kencana.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,(Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,CV, ,2018). cet.ke-2
- Sugiyono Memahami penelitian Kualitatif.(Bandung :Alfabeta,2014).
- Titik Triwulan Tutik.Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 ,Jakarta:2010,Edisi Pertama, cet. ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang –Undang /Peraturan

UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 403 tentang pemerintahan daerah.

Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal

Monica Galuh Sekar Wijayanti, dkk.”Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

M.RezekiMauliddin, Drs.RidwanMelay, M.Hum, Bunari, S.Pd. M.Si The History Of The Establishment Of Bengkalis Regency, Riau Province In 1958(A Historical Review.

Petrus Agapa, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Membuat Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2009 ± 2014”, Jurnal Renaissance | Volume 2 No. 02 | Agustus 2017.

Ryki Setiawan,TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara).

Willy Herdianto Surya Jurnal AKRAB JUARA Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 (1-14) EKSISTENSI ADAT ISTIADAT SUKU HUTAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Studi Kasus di Desa Kembung Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).

Website/Situs

http://digilib.uinsby.ac.id/24429/1/Mirza%20Elmy%20Safira_F02216034.pdf.

<https://media.neliti.com/media/publications/255793-pelaksanaan-fungsi-legislasi-dprd-dalam-2c873caf.pdf>.

<https://diskominfo.tik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/3>.

<http://wartasejarah.blogspot.com/2015/12/sejarah-terbentuknya-kabupaten-bengkalis.html> .

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Bengkalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

https://statistik.bengkaliskab.go.id/media/file/5946052349120201204_Buku_Statistik_Sektoral_2020.pdf.

<https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-legislasi/>.

<https://jdih.magetan.go.id/?p=865>.

<https://www.merdeka.com/quran/al-anam/ayat-57>.

https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109.

<http://deviapriyanti158.blogspot.com/2012/03/kajian-fiqh-siyasah-dan-perkembangannya.html>.

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-59>.

<https://jateng.nu.or.id/read/dnn8/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan>.

Wawancara

Kaderismanto (Wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkalis) wawancara pada tanggal 20 Juni 2020

LAMPIRAN

1. Dokumentasi wawancara dengan wakil ketua DPRD Bengkalis



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2020 DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH MENURUT FIQH SYARIAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **ADHA ENGGARTIAS**
NIM : 11724202926
Program Studi : Hukum tata negara

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 September 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Nuryanti, S.El. ME.Sy

Penguji I
Dr. Drs. H. Hajar, MAg

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui :
Kassubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JALAN ANTARA NO. TELP. (0766) 21080 - 21085 FAX. (0766) 22797

BENGKALIS 28751

SURAT KETERANGAN

Nomor : 170/ SEK-DPRD/IV/2021/160

Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah & Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/637/2021 tanggal 07 Januari 2021 Hal : Mohon Izin Riset, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dengan ini menerangkan Nama Mahasiswa di bawah ini :

NAMA	: ADHA ENGGARTIAS
NIM	: 11724202926
JURUSAN	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JENJANG	: S1

Benar telah mengadakan Riset di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 07 Januari s/d 19 April 2021 guna melengkapi data untuk bahan Skripsi yang berjudul : " **Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016/2020 dalam Pembentukan Peraturan Daerah ditinjau menurut Fiqih Siyasa**h".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,



H. RADIUS AKIMA, S.Sos. MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710522 199101 1 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.